

# STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH PEMILIHAN III DI TOMOHON SELATAN TAHUN 2019

Meraldi Tamuntuan

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado  
Corresponding Author: [meralditamuntuan397@gmail.com](mailto:meralditamuntuan397@gmail.com)

## ABSTRAK

Artikel ini akan mengkaji strategi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenangkan para calon anggota legislatif khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 di Tomohon Selatan Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara pada pemilihan anggota legislatif tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menggambarkan bahwa ada banyak strategi yang digunakan oleh PDI-Perjuangan dan calon dalam memenangkan pemilu 2019. Strategi yang digunakan mulai melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, pemasangan baliho, spanduk, dan kampanye, sosialisasi dan pendidikan politik kepada simpatisan dan masyarakat umum secara terus menerus dengan tujuan membentuk citra politik yang positif baik bagi partai maupun bagi calon-calon legislatif itu sendiri. Sedangkan strategi politik yang dilakukan oleh masing-masing calon legislatif mulai dari tahapan konsolidasi dengan kader partai, ranting partai, serta anak ranting dan para pemilih dikalangan masyarakat umum secara intens dinilai sangat efektif dalam meningkatkan perolehan suara caleg. Komunikasi langsung yang dilakukan oleh masing-masing caleg dengan masyarakat memberi pengaruh sangat signifikan. Walaupun hanya memperoleh 4 kursi legislatif namun strategi PDI-perjuangan sudah sangat baik terbukti dari suara pemilihan yang lebih banyak dibandingkan di periode sebelumnya. Disisi lain kualitas rekrutmen calon legislatif yang semakin ketat merupakan fondasi yang kokoh untuk PDI-Perjuangan melahirkan caleg yang mempunyai elektabilitas dan kualitas dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat serta aspirasi masyarakat.

**Kata Kunci : Strategi Politik; PDIP; Pemilihan Anggota Legislatif**

## ABSTRACT

*This article will examine the strategy adopted by the Indonesian Democratic Party of Struggle in winning legislative candidates, especially in the Electoral District (Dapil) 3 in South Tomohon, Tomohon City, North Sulawesi Province in the 2019 legislative elections. This research was conducted using a qualitative method. The research findings illustrate that there are many strategies used by PDI-Perjuangan and candidates in winning the 2019 election. The strategies used include carrying out social activities, installing billboards, banners, and campaigns, socialization and political education to sympathizers and the general public continuously with the goal is to form a positive political image for both the party and the legislative candidates themselves. Meanwhile, the political strategy carried out by each legislative candidate starting from the consolidation stage with party cadres, party branches, as well as branches and voters among the general public was intensely considered very effective in increasing the vote acquisition of candidates. The direct communication carried out by each legislative candidate with the community has a very significant impact. Even though it only won 4 legislative seats, the PDI-struggle strategy has been very good, as evidenced by the election votes that were more than in the previous period. On the other hand, the increasingly stringent quality of recruitment of legislative candidates is a solid foundation for the PDI-Struggle to produce legislative candidates who have electability and quality in fighting for people's rights and aspirations.*

**Keywords: Political Strategy; PDIP; Legislative Member Election**

## PENDAHULUAN

Strategi pemenangan partai politik adalah upaya yang dilakukan partai politik untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat dengan cara mengerahkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan memenangkan suara dalam pemilihan umum (Pemilu). Setiap strategi terfokus pada cara-cara dimana suatu partai politik dapat membedakan dirinya dengan partai politik lainnya. Strategi dilakukan dengan mengerahkan segala kemampuannya untuk memberikan nilai yang lebih baik kepada para pemilihnya dalam pemilu. Strategi masing-masing partai politik meraup kemenangan pada waktu pemilu berlangsung sangat ditentukan oleh ideologi dan platform masing-masing dimana partai politik tersebut merebut simpati pemilihnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki berbagai strategi untuk menarik simpati dari masyarakat. Semakin banyak simpati yang diperoleh dari masyarakat maka semakin tinggi peluang untuk memenangkan pemilu. Strategi (PDIP) dalam memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 antara lain terletak pada penggalangan massa yang dilakukan dengan mengumpulkan atau mencari massa sebanyak-banyaknya pada saat akan melaksanakan kampanye, selanjutnya strategi PDIP dalam memenangkan pemilu juga terletak pada kampanye politik.

Bentuk kampanye politik yang dilakukan oleh PDIP yakni membuat gerakan dengan mengaktifkan cabang dan ranting, mengadakan kegiatan kunjungan silaturahmi, serta mengadakan berbagai kegiatan bersama masyarakat. Kemudian sosialisasi politik yang dilakukan PDIP untuk semakin dekat dengan masyarakat, serta komunikasi politik yang dilakukan dengan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti Aspirasi masyarakat. Kewajiban ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPRD Kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun Aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga peranan penting. Pertama, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakat. Ketiga, DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang melekat pada DPRD biasa dimaknai sebagai peran keperantaraan. DPRD tidak hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah (eksekutif) dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangan dari berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya (Sianturi 2014:4).

Anggota DPRD dalam perwakilannya memiliki daerah pemilihan masing-masing atau yang disingkat dengan dapil. Daerah pemilihan dibagi berdasarkan cakupan luas atau lingkup wilayah tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melakukan sebuah hubungan keterikatan dengan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah pemilihannya. Masyarakat tersebut disebut dengan istilah "konstituen".

Konstituen atau pemilih merupakan pemberi mandat kepada pihak yang diberi tanggungjawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harus dilayani oleh parlemen. Sistem pendapilan ini sangat berguna bagi anggota DPRD maupun masyarakat, melalui sistem ini dapat teridentifikasi lebih jelas tentang siapa mewakili siapa dan dari daerah mana. Para wakil rakyat dapat menyadari bahwa mereka terpilih karena mewakili orang dan daerah tertentu. Sebaliknya, para pemilih juga dapat mengetahui siapa yang mewakili mereka dan daerahnya (Marijan 2010:53). Bambang Cipto dalam bukunya "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial" (1995:10) menyatakan bahwa lembaga legislatif tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang (law-making body) semata, tetapi juga sebagai perantara rakyat kepada pemerintah. Realisasi dari pengambilan kebijakan yang berdasarkan kepentingan seluruh rakyat merupakan cerminan dari

keikutsertaan rakyat, sebagaimana yang diajarkan dalam teori demokrasi. Menurut Arbi Sanit (1985:203) teori demokrasi mengajarkan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi dalam proses dan penentuan kebijakan pemerintah.

Para wakil rakyat melakukan tindakan atau bertindak atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan kebijakan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan rakyat. Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang ditengah tengah masyarakat, maka para wakil rakyat harus dapat menyerap aspirasi masyarakat dengan baik.

Pemilihan umum 2019 dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan persaingan ketat diantara caleg dalam satu dapil mereka. Untuk memenangkan pemilu, para caleg saling bersaing satu sama lain dalam satu partai atau dengan caleg partai lain. Persaingan ini mengakibatkan para caleg saling beradu strategi taktik dan metode pemenangan. Strategi dan taktik ini juga di dukung dengan ongkos biaya politik yang besar untuk menunjangnya. Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Tanpa strategi, kekuasaan yang merupakan tujuan utama berpolitik tidak akan pernah terwujud. Selain itu untuk memenangkan pertarungan pemilu khususnya DPR dan DPRD perlu adanya konsolidasi sebagai tahapan dari strategi.

Terkait dengan pemilu yang diadakan di Kota Tomohon PDIP belum berhasil memenangkan pemilu karena pengaruh Partai Golkar yang merupakan basis di kota Tomohon sehingga PDIP tidak berhasil memenangkan pemilu tersebut, akan tetapi Dalam Pileg tersebut yang berhasil menduduki kursi DPRD Kota Tomohon dapil III Kecamatan Tomohon Selatan yaitu Noldie Lengkong (PDIP) dengan perolehan suara 1.134 suara sah. Kemenangan tersebut tidak lepas dari Strategi Tim pemenangan dari Paslon tersebut, sehingga berhasil duduk di kursi anggota dewan kota tomohon fraksi PDIP dapat bersaing dengan paslon lainnya khususnya dari partai basis pada waktu itu dan berhasil mendapatkan total suara yang dibutuhkan

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk melihat strategi partai politik khususnya PDIP dalam Memenangkan Pileg 2019. Untuk memenangkan pemilu setiap peserta Pemilu yang diusung oleh partai politiknya akan berupaya menerapkan strategi yang baik dalam mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih. Strategi politik penting sekali dilakukan organisasi politik. Hal ini mengingat bahwa diperlukan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan organisasi yang akan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Teori Strategi**

Secara umum strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategik bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Strategi menurut Peter Schorder dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik, Politik Strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul Competitive Strategy dalam Harvard Business Review (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik.

Strategi politik sangat penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara partai politik, dimana strategi mengkaji tentang teknik pendekatan kontestan pada kelompok pemilih. Sebab itu, strategi politik harus dipikirkan dan direncanakan secara matang oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara instens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan pertarungan politik.

Dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politik yang terbantu dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau kontestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan coblos para pemilih (Adman Nursal, 2004). Tujuan akhir dalam strategi politik adalah untuk membawa calon legislatif yang didukung oleh strategi politiknya menduduki jabatan anggota legislatif yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Strategi politik adalah rencana yang sistematis dan terstruktur dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan.

## **B. Partai Politik**

Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiarjo, 2002: 166) Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Parpol) pasal 1 ayat (1), yang dinamakan dengan partai politik adalah : “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelakupelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat.

Definisi tentang partai politik antara lain disampaikan oleh Carl J. Fredrich mengartikan partai politik sebagai “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materiil” (Budiarjo, 2002: 161). Selanjutnya Sigmund Neuman dalam karangannya modern political parties mengemukakan definisi sebagai berikut: “Partai politik adalah organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk kekuasaan 14 pemerintah serta merebut kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda” (Budiarjo, 2002: 166) Kemudian berdasar definisi yang dikembangkan Neumann tersebut, Cheppy Hari Cahyono (1991) mengingatkan perlunya diperhatikan empat hal sehubungan dengan usaha memperjelas pengertian mengenai istilah partai politik. Keempat hal itu yaitu: (1) Partai politik merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam suatu masyarakat; (2) Partai politik mencurahkan perhatian untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya; (3) Partai politik berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan masyarakat yang mempunyai pandangan berbeda-beda; dan (4) Partai politik merupakan lembaga perantara yang menghubungkan antara kekuatan-kekuatan sosial dan ideologi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah maupun lembaga-lembaga kenegaraan (Cahyono, 1991: 195-196).

Melalui beberapa pendefinisian di atas setidaknya dapat ditarik titik terang mengenai konsep partai politik, yang mana merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan dan cita-cita. Cita-cita untuk berkuasa. Terutama dalam memperebutkan kekuasaan di dalam negara. Dalam iklim negara demokrasi, untuk mewujudkan cita-cita partai politik membutuhkan simpati dan dukungan suara baik dari anggota (kader) partai maupun masyarakat luas guna memperoleh mandat kekuasaan (legitimasi) melalui proses pemilihan umum.

Partai politik berusaha mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat luas dengan lembaga-lembaga yang melakukan kebijakan-kebijakan politik. Partai politik merupakan tempat menyalurkan aspirasi rakyat, di mana rakyat dapat ikut di dalamnya dan berpengaruh kuat dalam pemilu, dalam pemilu 1999, 2004 dan 2009, bukanlah pemilu multipartai yang

terutama. Pada pemilihan umum tahun 1955 juga diikuti banyak partai politik politik (multipartai), yang ketika itu diikuti 36 partai politik (36 tanda gambar), tahun 1999 di ikuti 48 partai politik, tahun 2004 di ikuti 24 partai 15 politik dan di tahun 2009 ada 44 partai politik yng terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai daerah di aceh.

Banyaknya partai politik ini melambangkan sebuah negara yang demokratis, yang kemudian diharapkan menjadi penyalur aspirasi rakyat yang beragam, serta penyeimbang kekuatan politik yang ada. Begitu juga dengan banyaknya partai, di harapkan menjadi lembaga kontrol terhadap pemerintah serta sebagai sarana mengkritik rezim yang berkuasa. Adapun ada yang pro dan kontra dengan suburnya politik yang akan mendaftarkan diri sebagi peserta partai politik (Haryanto, 1984: 11).

Tujuan dari partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 10, tujuan partai politik dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus partai politik. Tujuan umum partai politik yaitu, (1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik yaitu, (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; dan (2) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

#### **1. Partai sebagai Sarana Komunikasi Politik**

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa 16 sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Selain itu partai politik disini juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai poitik memainkan peranan sebagi penghubung antara pemerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dengan masyarakat.

#### **2. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui bagaimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Sosialisasi politik mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi yang lain. Salah satu upaya untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum maka partai harus melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat. Disinilah fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, tepatnya agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sisi lain dari fungsi partai politik adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa patai politik memperjuangkan kepentingan umum.

#### **3. Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik**

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitmen). Partai juga dapat memperluas partisipasi politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi dan lainlain. Usahakan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of leadership)

#### **4. Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik (conflict management)**

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Jika terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam kehidupan masyarakat luas, dimana berbagai kepentingan bercampur baur tidak sedikit melahirkan konflik, semua beradu untuk mendapatkan kemenangan, disamping mudah terpicu

konflik horizontal diantara warga masyarakat, juga tidak sedikit melahirkan konflik structural penentangan terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam kondisi demikian, partai politik harus tampil sebagai penengah, menjadi peredam konflik. Berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada penguasa, dan menginformasikan kehendak penguasa politik kepada masyarakat (Haryanto, 1984: 11). Sedangkan fungsi Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 tentang Partai Politik adalah; (1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Secara empiris eksistensi sebuah partai politik, menurut Ali Syafa'at, dapat dilihat berdasar tiga aspek. Diantaranya adalah aspek sosiologis, aspek yuridis dan juga aspek politis (Syafa'at, 2011 65). Aspek sosiologis menurutnya nampak dari adanya gerakan-gerakan sosial yang diperjuangkan sebuah partai politik sejak didirikan. Sedangkan dalam aspek yuridis, menurut Hans Kelsen, Syafa'at menjelaskan bahwa eksistensi partai politik secara hukum ada ketika menerima status secara sah sebagai badan hukum baik karena cara pembuatan maupun setelah proses tertentu.

Kemudian dalam aspek politis eksistensi sebuah partai politik ada ketika partai politik tersebut terlibat dalam aktivitas politik, terutama dalam kaitannya dengan 18 proses penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam negara demokrasi mekanisme utama untuk memasuki wilayah dan kekuasaan politik adalah dengan hanya melalui "gerbang" pemilihan umum. Oleh karenanya keberadaan dan kekuatan partai politik secara politis ditentukan saat mengikuti pemilihan umum di negara yang bersangkutan.

### C. Komunikasi Politik

Secara umum, komunikasi politik lazim dikaitkan dengan pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun non verbal yang dapat mempengaruhi rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik. Atau secara sederhana dapat disebutkan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bermuatan politik dari suatu sumber kepada penerima untuk menciptakan pemahaman makna bersama.

Komunikasi politik adalah gejala yang membuat kepentingan-kepentingan politik dapat disalurkan melalui media dan tindakan yang lebih tepat dan efektif. Kepentingan dalam mendapatkan sesuatu merupakan motivasi seseorang untuk melakukan tindakan komunikasi. Fungsi komunikasi politik membantu partai politik terhadap konstituennya dengan memberikan informasi, masukan seputar dunia politik kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat (Miriam Budiardjo, 2002 ).

Dalam buku *Introduction to Political Communication* oleh McNair (2003) dinyatakan bahwa "*political communication as pure discussion about the allocation of public resources (revenue), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state reward or punishes).*"

Jadi komunikasi politik menurut McNair adalah murni membicarakan tentang alokasi sumber daya public yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi, apakah itu dalam bentuk hadiah atau benda.

R.H. Blake dan Haroldsen dalam bukunya "*A Taxonomi of concepts in communication*" (1975) menggolongkan komunikasi politik sebagai salah satu dari sembilan bentuk (form) komunikasi. Kesembilan bentuk komunikasi tersebut antara lain, komunikasi intra-pribadi, komunikasi antar-pribadi, komunikasi organisasional, rumor, komunikasi massa, komunikasi media massa, telekomunikasi, dan komunikasi non-verbal.

Alat komunikasi politik antara lain: media massa, komunikasi kontak langsung, jaringan-jaringan infrastruktur. Media massa merupakan alat komunikasi politik berdimensi dua, yaitu bagi pemerintah sebagai alat mentransformasikan kebijaksanaan politik, dan bagi masyarakat

sebagai sarana sosial kontrol. Bagi aktor politik, peran media massa kian penting karena media memiliki kemampuan komunikasi dengan banyak orang dengan latar belakang sosial yang berbeda. Melalui media massa, aktor politik dapat menjangkau khalayak luas dalam waktu serempak serta terus menerus. Para aktor politik semakin bergantung pada media massa dalam aktivitas komunikasi politik (Junaedi, 2013).

Menurut Cangara (2016) media adalah alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya Media Cetak; surat kabar, tabloid, majalah, buku. Media Elektronik; film, radio, televisi, video, komputer, internet. Media Format Kecil; leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin. Media luar ruang (outdoor media); baliho, spanduk, reklame, electronic board, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, kalender, payung, dan segala sesuatunya yang bisa digunakan untuk membangun citra (image building).

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik adalah pembicaraan atau penyampaian pesan-pesan politik yang dapat berpengaruh terhadap perilaku politik seseorang. Berdasarkan uraian teori di atas, maka peneliti memilih salah satu teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Cangara (2016). Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada media televisi, surat kabar, dan internet yang digunakan peneliti sebagai indikator dari komunikasi politik.

#### **D. Pemilu**

Pemilu adalah salah satu pilar utama dari demokrasi. Secara tidak langsung demokrasi di Indonesia mengandung arti bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat, dilaksanakan pemilu. Dalam pemilihan umum diharapkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.

Dalam konteks sistem politik, pemilu mengandung tiga pranata secara keseluruhan yang menghubungkannya dengan demokrasi yaitu: (1) persaingan, yakni apakah setiap orang diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai calon yang mewakili rakyat; (2) peran serta politik (partisipasi politik), yakni rakyat ikut serta dalam proses seleksi wakil atau pemimpin mereka dan memilih mereka sebagai pemimpin untuk semuanya; (3) kebebasan politik dan kebebasan sipil yang mewujudkan dalam kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi dasar persaingan dan peran serta. Dengan demikian pemilu dapat menjadi aktualisasi asas kedaulatan rakyat yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pelaksanaan pemilu merupakan amanah berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian pemilu merupakan salah satu perwujudan jaminan hak asasi warga negara. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk turut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah dan salah satunya adalah melalui pemilu yang sering disebut sebagai pesta demokrasi bagi rakyat. 19 Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik (Syarbaini, 2002: 80).

Menurut Ramlan, pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya (Cholisin dkk, 2005:128"). Tujuan dari pemilu dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat 2 dinyatakan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 3 juga disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota.

Dengan pelaksanaan pemilu dengan partisipasi rakyat maka diharapkan akan mampu menjadikan perubahan yang berarti bagi keidupan rakyat, bangsa dan negara. Pemilihan umum mempunyai peran penting dalam negara demokrasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal

2, bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas; (1) langsung yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara; (2) umum yaitu mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial; (3) bebas yaitu setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun; (4) rahasia yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun; (5) jujur dalam penyelenggaraan pemilu aparat pemerintah, peserta pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak terkait harus jujur sesuai dengan 20 peraturan perundang-undangan; dan (6) adil yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilu dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses penyelenggaraan pemilihan umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga yang berkualitas. Para anggota DPRD sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara dan untuk membentuk pemerintahan. Keterkaitan antara partai politik dengan pemilu legislatif yaitu bahwa setiap anggota legislatif yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif harus berasal dari partai politik tertentu. Hal tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap calon legislatif. Partai politik merupakan wadah yang digunakan untuk mengantarkan calon/ individu untuk menduduki kursi legislatif di Indonesia. Pemilu legislatif yang sangat identik dengan partai politik, merupakan hal yang wajar dalam suatu negara demokrasi yang memiliki sistem multi partai, yang artinya partai politik memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umum dan/ atau pemilu legislatif yang diselenggarakan di negara yang bersistem demokrasi seperti halnya Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di pergunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2005), dengan fokus penelitian yaitu mengidentifikasi strategi Partai PDIP dalam kemenangan anggota legislatif di Kota Tomohon terutama di Kecamatan Tomohon Selatan Tahun 2019. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh di analisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Strategi PDI-Perjuangan Dalam Kemenangan Anggota Legislatif Daerah Pemilihan III di Tomohon Selatan Tahun 2019**

Dalam menghadapi kompetisi politik yaitu PEMILU diperlukan persiapan serta strategi dalam menghadapi pertarungan politik. Dengan adanya strategi yang matang akan dapat mempermudah dalam menghadapi medan apapun. Sebab, dalam pertarungan hanya diperlukan strategi bagaimana menaklukkan lawan dan memenangkan pertarungan.

Telah dikemukakan pada bagaian sebelumnya, oleh Peter Schorder dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik, Strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. maka pada umumnya setiap kontestan perlu melakukan teknik pendekatan pada kelompok pemilih. Sebab itu tiap kontestan wajib menyusun strategi politik secara sistematis dan terstruktur dengan harapan dapat memenangkan pertarungan politik, karena pesaing juga secara intensif melakukan upaya-upaya memenangkan pertarungan.

Secara umum strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategik bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.



Dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politik yang terbantu dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau kontestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan coblos para pemilih (Adman Nursal, 2004). Tujuan akhir dalam strategi politik adalah untuk membawa calon legislatif yang didukung oleh strategi politiknya menduduki jabatan anggota legislatif yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Dari fakta yang ditemukan penulis saat melakukan penelitian di lapangan terlihat bahwa, ada banyak strategi yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan dalam pemenangan anggota legislatif. Strategi-strategi tersebut mampu membawa PDI-Perjuangan memperoleh jumlah kursi, yaitu sebanyak 1 kursi di Dapil III dan secara keseluruhan memperoleh 4 dari 20 Kursi dengan jumlah suara sebanyak 7.280 suara sah. Jumlah tersebut otomatis menempatkan PDI-Perjuangan pada posisi kedua di DPRD Kota Tomohon, di karenakan Partai Golkar merupakan basis di Kota Tomohon pada pileg 2019.

Strategi-strategi yang digunakan PDI-Perjuangan dalam Memenangkan Pileg 2019 cukup bervariasi, salah satunya adalah melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti memberikan sumbangan untuk masyarakat fakir dan miskin dan gotong-royong massal, membersihkan rumah-rumah ibadah dan lain lain. Strategi seperti ini dianggap menjadi salah satu strategi yang paling efektif dan dapat diterima oleh masyarakat luas, karena dalam strategi ini pihak-pihak partai maupun caleg yang bersangkutan dapat melakukan komunikasi politik dengan para pemilih dengan harapan dapat mempengaruhi dan menarik simpati dari pemilih agar memilih caleg yang bersangkutan dan tentunya berasal dari Partai PDI-Perjuangan. Selain itu strategi ini diharapkan meningkatkan citra partai/caleg maupun elektabilitas para caleg.

Fakta juga menunjukkan jika PDI-Perjuangan juga menggunakan strategi seperti pemasangan spanduk dan baliho di pinggir-pinggir jalan raya. Strategi ini merupakan strategi yang sangat umum digunakan oleh caleg-caleg maupun partai-partai lainnya dengan tujuan agar masyarakat/pemilih dapat mengenali siapa caleg yang akan dipilihnya dalam pemilu nanti. Selain itu juga pemasangan iklan di stasiun radio lokal. Strategi lainnya adalah kampanye politik maupun sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan simpatisan serta memberikan pendidikan politik baik bagi masyarakat maupun simpatisan. Selain itu pemantapan kaderisasi kader partai juga menjadi bagian dari strategi. Dimana diharapkan para kader-kader bisa mempengaruhi peningkatan jumlah pendukung terhadap PDI-Perjuangan di Kota Tomohon.

## **B. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan strategi pemenangan PDI-Perjuangan Pemilu Legislatif pada tahun 2019 di Tomohon Selatan Dapil III**

Ada hambatan yang terjadi saat pencalonan legislatif tahun 2019 di Tomohon Selatan, yang di rasakan oleh partai dan sekaligus calon pada saat itu. Kendala yang di hadapi saat itu diri sendiri, karena kalau kata hanya sebatas janji dan tidak menerapkannya terasa sangat menghambat juga pengahambatnya adanya sisi Negatif di dalam maupun dari luar (internal maupun eksternal) juga adanya *black campaign* yang sangat merugikan dan juga pengaruh partai yang berkuasa saat itu adalah partai Golkar, yang sangat merugikan dari partai PDI-Perjuangan saat itu. Itu yang menjadi hambatan terbesar partai PDI-Perjuangan.

Ada kendala yang dirasakan PDI-Perjuangan dalam memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan itu. kendala PDI-Perjuangan Kota Tomohon dalam merekrut 30% Caleg perempuan, misalnya saja setiap pengurus diwajibkan untuk mencari caleg perempuan yang bersedia maju, masih banyak para kader perempuan yang tidak memiliki kepercayaan diri karena banyaknya caleg dari laki-laki yang ada di PDI-Perjuangan ini. Secara umum, perempuan masih memandang Pemilu sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat. Wakil rakyat dipahami sebagai orang yang dapat dipercaya oleh rakyat, bisa menyampaikan suara rakyat, dan mampu membawa kehidupan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari eksplorasi yang dilakukan, mayoritas caleg perempuan belum mengerti urgensi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bagi mereka, tidak masalah caleg laki-laki atau perempuan asal mau mengerti penderitaan rakyat.

Namun, mereka bisa bersepakat ketika dijelaskan pentingnya perempuan ada dilembaga legislatif, termasuk untuk memilih calon wakil rakyat perempuan. Perempuan yang

diinginkan adalah perempuan ideologis, yaitu perempuan yang memiliki intelektual dan emosional serta mampu memperjuangkan agenda perempuan.

## **KESIMPULAN**

Ada banyak strategi yang digunakan oleh PDI-Perjuangan dan calon dalam memenangkan pemilu 2019. Strategi yang digunakan mulai melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, Pemasangan baliho, spanduk, dan Kampanye, Sosialisasi dan pendidikan politik kepada simpatisan dan masyarakat umum secara terus menerus dengan tujuan membentuk citra politik yang positif baik bagi partai maupun bagi calon-calon legislatif itu sendiri.

Strategi politik yang dilakukan oleh masing-masing calon legislatif mulai dari tahapan konsolidasi dengan kader partai, ranting partai, serta anak ranting dan para pemilih dikalangan masyarakat umum secara intens dinilai sangat efektif dalam meningkatkan perolehan suara caleg. Komunikasi langsung yang dilakukan oleh masing-masing caleg dengan masyarakat memberi pengaruh sangat signifikan. Walaupun hanya memperoleh 4 kursi legislatif namun strategi PDI-perjuangan sudah sangat baik terbukti dari suara pemilihan yang lebih banyak dibandingkan di periode sebelumnya.

Disisi lain kualitas rekrutmen calon legislatif yang semakin ketat merupakan fondasi yang kokoh untuk PDI-Perjuangan melahirkan caleg yang mempunyai elektabilitas dan kualitas dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat serta aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa Strategi pemenagan calon legislatif yang dilakukan PDI-Perjuangan sudah baik. Dengan kata lain Strategi PDI-Perjuangan dalam pemenagan calon legislatif dikota Tomohon Dapil III sudah dapat dilaksanakan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adman Nursal, 2004, **Political Marketing, Strategi memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden**, Gramedia, Jakarta.
- Ali Syafa'at. 2011. **Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik**. Jakarta: Rajawali Pers
- Arbi Sanit, 1985. **Perwakilan Politik di Indonesia**, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1985.
- Blake, R.H and Edwin. O. Haroldsen. 1975. **A Taxonomy of Concepts in. Communication 2nd ed**. Toronto : Hastings House Publishers Inc.
- Budiardjo, Miriam. 2002. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied. 2016. **Pengantar Ilmu Komunikasi**. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali. Pers
- Cheppy Haricahyono. 1991. **Ilmu Politik dan Perspektifnya**. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Tiara. Wacana
- Cipto, Bambang, 1995. **DPR Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial**. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Haryanto. 1984. **Partai Politik Suatu Tinjauan Umum**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Junaedi, Fajar. (2013). **Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia**. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta
- Lexy J., Moleong. 2005. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Marijan, Kacung 2010. **Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde. Baru**. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- McNair, Brian. 2003. **An Introduction to Political Communication**, New York-. London: Routledge Taylor & Francis Group
- Porter, Michael E, (1996), **Strategi Bersaing: Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing**, Erlangga, Jakarta.
- Schroder Peter, 2000, **Strategi Politik** (edisi bahasa Indonesia), yang diterjemahkan oleh. D.J Matindas, Friedrich\_Naumann\_Stiftung.
- Syahrial Syarbaini, dkk. 2002. **Sosiologi dan Politik**. (Jakarta : Ghalia Indonesia

**Sumber Lainnya:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik